

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka menggambarkan konsep dasar mengenai variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan penelitian terdahulu. Selanjutnya pada bab ini akan membahas tentang kerangka pemikiran yang membahas tentang hubungan antara *dependent variable* dengan *independent variable* dan diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai kenaikan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa hingga peningkatan dari pendapatan nasional suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) untuk ruang lingkup nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk lingkup

wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi bergerak menuju era globalisasi. Secara internal ada tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. (Kalsum, 2015)

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Setidaknya ada tiga pemikir utama yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik di antaranya:

1. Teori Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh (*steady growth*). Semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak.

2. Teori Schumpeter

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu memperluas usaha, melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan

pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, akan berdampak pada tersedia lapangan kerja tambahan yang akan menyerap angkatan kerja.

3. Robert Solow

Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil.

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam. Sumber daya alam atau segala sesuatu yang berasal dari alam, meliputi kesuburan tanah, letak dan komposisinya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, dan sumber kelautan. Dalam kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat mendukung pembangunan.

Sebagian besar negara berkembang bergantung pada sumber daya alam untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, apalagi jika tidak didukung dengan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak organisasi di perusahaan dan institusi. Sumber daya manusia bertindak sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti teknologi, dan modal. Manusia adalah yang kemudian mengendalikan faktor-faktor lain ini. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kecepatan proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia yang akan dikembangkan memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan proses pertumbuhan ekonomi.

3. Akumulasi Modal

Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat diproduksi. Akumulasi modal sebagai proses peningkatan modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Manusia membutuhkan modal untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Modal berupa barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran fungsi pembangunan ekonomi karena barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Pengorganisasian produksi sebagai bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan penggunaan faktor-faktor produksi dalam berbagai fungsi ekonomi. Organisasi produksi ditangani dan diatur oleh manajer dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat proses pembangunan. Perubahan cara kerja yang semula menggunakan tangan manusia telah digantikan oleh mesin-mesin canggih yang mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Berbagai aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada akhirnya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

6. Faktor Politik dan Administrasi Negara

Dari sudut pandang nonekonomi, faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi negara. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.

2.1.2 Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali, ketika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya (Bank Indonesia).

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang, dengan demikian inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (Badan Pusat Statistik).

Inflasi dihitung oleh badan pusat statistik (BPS) dengan cara menghitung perubahan indeks harga konsumen (IHK). Indeks harga konsumen (IHK) menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

2.1.2.1 Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori ini berpendapat bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa. Inti teori ini yaitu inflasi akan terjadi jika terjadi peningkatan jumlah uang beredar, baik valuta asing maupun uang giral. Tingkat inflasi ditemukan oleh tingkat pertumbuhan uang beredar dan ekspektasi publik akan kenaikan harga di masa depan. Jika orang berpikiran seperti itu, tidak ada lagi kecenderungan untuk menabung dan mereka lebih memilih menyimpan asetnya dalam bentuk barang.

2. Teori Keynes

Teori keynesian digunakan untuk menjelaskan inflasi dalam jangka pendek. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes, teori inflasi Keynes didasarkan pada teori makronya. Menurutnya inflasi terjadi karena sebagian orang ingin hidup di luar kemampuan ekonominya.

Keadaan ini diwujudkan dengan permintaan masyarakat akan barang yang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Hal ini akan menyebabkan *inflationary gap*, dimana ketika *inflationary gap* ada maka selama itu akan terus berlangsung proses inflasi terjadi dan berkelanjutan.

3. Teori Strukturalis

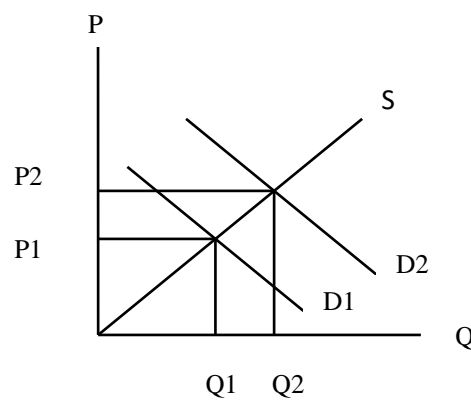
Teori strukturalis merupakan teori inflasi jangka panjang karena menekankan penyebab inflasi yang bersumber dari kekakuan (*inflexibility*) struktur ekonomi suatu negara. Menurut teori ini, ada dua kekakuan utama dalam perekonomian negara berkembang yang dapat menyebabkan inflasi yaitu kekakuan pemasokan pangan dan ekspor.

Kekakuan pemasokan pangan, yaitu produksi pangan dalam negeri tidak meningkat secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita, sehingga harga pangan dalam negeri cenderung meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang lainnya, dan kekakuan pendapatan ekspor yaitu nilai ekspor tumbuh lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan Inflasi

1. *Demand Pull Inflation*

Demand Pull Inflation adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan.



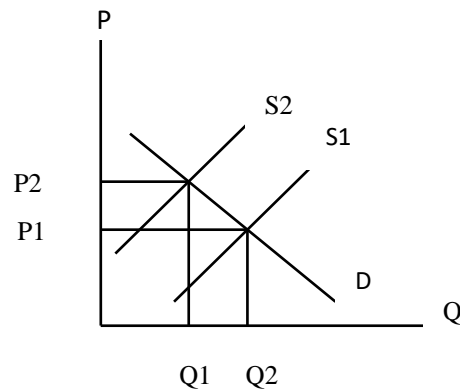
Gambar 2.1 *Demand Pull Inflation*

Sumber: Hasil olahan penulis

Permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah maka kurva permintaan agregat bergeser dari D1 ke D2 akibatnya tingkat harga umum naik dari P1 ke P2.

2. *Cost Push Inflation*

Cost Push Inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi yang naik. Jika biaya produksi naik, maka produsen akan membatasi jumlah barang yang diproduksi, sehingga produk yang dibutuhkan masyarakat jumlahnya terbatas. Keadaan terbatasnya jumlah produk yang dibutuhkan masyarakat, tentu membuat masyarakat akan rela membeli produk dengan harga yang lebih tinggi.



Gambar 2.2 Cost Push Inflation

Sumber: Hasil olahan penulis

Ketika biaya produksi naik misalnya karena kenaikan harga bahan bakar minyak, maka kurva penawaran masyarakat bergeser dari S1 ke S2, akibatnya tingkat harga umum naik dari P1 ke P2.

2.1.2.3 Derajat Inflasi

1. Inflasi Ringan

Inflasi ringan mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian karena kenaikan harga barang atau jasa hanya secara umum. Kenaikan harga yang terjadi pada inflasi ini di bawah 10% per tahun.

2. Inflasi Sedang

Inflasi sedang dapat membahayakan aktivitas perekonomian karena dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Kenaikan harga yang terjadi pada inflasi ini berkisar antara 10% - 30% per tahun.

2. Inflasi Tinggi

Inflasi tinggi dapat mengacaukan perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung di bank karena bunga bank jauh lebih kecil. Kenaikan yang terjadi pada inflasi ini berkisar 30%- 100% per tahun.

3. Hiperinflasi

Hiperinflasi sangat sulit untuk dikendalikan karena kenaikan harga yang terjadi berada di atas 10% per tahun.

2.1.2.4 Dampak Inflasi

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat.

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus menurun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi juga akan mendistorsi pajak pendapatan atau keuntungan yang dikenakan oleh pemerintah

kepada masyarakat, baik pajak terhadap perseorangan maupun badan usaha yang pada umumnya bersifat progresif, artinya, semakin besar pendapatan atau laba yang diperoleh, maka tarif pajaknya akan semakin besar.

2.1.2.5 Pengendalian Inflasi

Inflasi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, maka setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi pada suatu tingkat yang rendah dan stabil. Beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi di antaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga sehingga tingkat konsumsi menurun, diharapkan dengan harga barang atau jasa yang turun maka masalah ini dapat teratasi, cara mengatasi inflasi tersebut terbukti efektif untuk mengatasi inflasi. Kedua, menghemat pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga dapat berkurang.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter, dengan begitu diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan inflasi dapat teratasi. Ada tiga hal yang dapat dilakukan dalam kebijakan moneter. Pertama, kebijakan diskonto yaitu, meningkatkan nilai suku bunga, agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Kedua, kebijakan penetapan persediaan kas, dengan mengurangi

jumlah uang beredar inflasi dapat ditekan. Bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pengurangan jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga.

3. Kebijakan Lainnya

Ada beberapa kebijakan efektif lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi selain melalui kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, dengan melonggarkan impor dengan cara menurunkan bea masuk barang impor. Kedua, pemerintah dapat mengendalikan harga yang ada dengan realistis, agar tidak menjadi pasar gelap (*black market*).

2.1.3 Investasi

Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) pada masa-masa yang akan datang (Badan Pusat Statistik). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan suatu usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan suatu usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Secara prinsip investasi dapat dibedakan menurut investasi finansial dan investasi nonfinansial. Investasi finansial lebih ditunjukkan kepada investasi dalam bentuk kepemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal, surat berharga, obligasi dan lain-lain, sedangkan investasi nonfinansial dilaksanakan dalam bentuk investasi fisik yang berwujud kapital atau barang modal (Badan Pusat Statistik).

2.1.3.1 Teori Investasi

1. Teori Investasi Keynes

Berdasarkan teori investasi Keynes, keputusan investasi diambil dengan membandingkan *marginal efficiency of capital* (MEC) dengan tingkat bunga riil. *marginal efficiency of capital* (MEC) adalah tingkat pengembalian ketika suatu proyek mencapai titik impas (BEP) atau keuntungan yang diharapkan dari sebuah Investasi. Ketika nilai MEC lebih besar dibandingkan tingkat bunga riil, maka investasi dapat dilakukan. Ketika nilai MEC sebanding dengan nilai r , maka tidak ada lagi penanaman dana atau modal pada aset investasi yang memperoleh penghasilan. Teori investasi Keynes juga berpendapat bahwa jumlah atau volume investasi tidak hanya bergantung pada keuntungan atau satu faktor saja, tetapi juga dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat bunga.

2. Teori Investasi Harrod-Domar

Teori investasi Harrod-Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kegiatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, investasi dianggap sebagai faktor penting dan memainkan dua peran dalam mempengaruhi perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi maka semakin banyak kegiatan investasi dan semakin tinggi penerimaan negara. Kedua, investasi dapat meningkatkan kapasitas produktivitas perekonomian dengan meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dipandang sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari dua hal di atas, artinya investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran, dalam jangka panjang investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregat, tetapi juga penawaran agregat melalui perubahan kapasitas produksi.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa pendapatan asli daerah atau biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(Badan Pusat Statistik, 2022)

2.1.4.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perjanjian tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal atau investasi pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal atau investasi pada

perusahaan milik pemerintah atau BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi pada perusahaan swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan dan lain-lain.

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran, sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang

masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (Badan Pusat Statistik).

2.1.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu:

1. Jumlah penduduk yang masih bersekolah

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja.

3. Struktur Umur

Penduduk yang berumur masih muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga, bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah, oleh sebab itu tingkat partisipasi angkatan kerja relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55

tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja umumnya rendah.

4. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi penduduk yang tertarik masuk pasar kerja, secara tidak langsung tingkat partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat

5. Tingkat Pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja semakin besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian- penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai kajian atau bahan pembanding terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti, Tahun, Judul penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber Referensi |
|-----|---|---|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Haris Mutasim Billah, Riko Setya Wijaya (2022) Pengaruh PAD, DAU, Inflasi dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo | Inflasi Investasi Pertumbuhan Ekonomi PAD | DAU | Inflasi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. PAD dan DAU memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. | ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisi plin. Vol. 1, No.8, ISSN: 2810-0581 |
| 2 | Mutia Sari, (2016) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Investasi Pertumbuhan ekonomi | Pengeluaran pemerintah Tenaga kerja | Secara parsial investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara simultan investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap | Jurnal Ekonomi. Vol.2, No.3, E-ISSN: 2797-0086 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. | |
| 3 | Yusra Mahzalena (2019) Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. | Inflasi Pertumbuhan Ekonomi | Pengeluaran Pemerintah Ekspor | Ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. | Jurnal Ekonometrika Regional Unimal. Vol.3, No.1, E-ISSN: 2615-126X |
| 4 | Eraima Wati Tamba (2020) Pengaruh PAD, DB, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. | Investasi Pertumbuhan Ekonomi PAD | Dana Berimbang (DB) | Secara simultan pendapatan asli daerah, dana berimbang, investasi, tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah, tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi, dana berimbang tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. Vol.4, No.3, P-ISSN: 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 5 | Dwi Saraswati (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/kota Sumatera Utara. | Pertumbuhan Ekonomi PAD | Dana Perimbangan sebagai pemoderasi | Secara parsial pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan berdasarkan uji residual dana perimbangan tidak memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. | Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik. Vol.8, No.2, ISSN: 2087-4669 |
| 6 | Muh. Rahmatullah (2022) Pengaruh Belanja Modal, Inflasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. | Inflasi Pertumbuhan Ekonomi | Tenaga Kerja Belanja Modal | Belanja modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota | Jurnal Ekonomi Global (JEG) Vol.1, No. 2, P-ISSN: 27722-4937 E-ISSN: 2722-4961 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|---|
| | | | | Makassar. | |
| 7 | Basri Bado (2016) Analisis Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan | Investasi Pertumbuhan Ekonomi | Tenaga Kerja Belanja Modal | Belanja modal, investasi, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Secara parsial belanja modal dan tenaga kerja berpengaruh positif, sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. | Jurnal Ilmiah Econosains. Vol.14, No.2, E-ISSN: 2252- 8490 |
| 8 | Dewa Ayu Dwi, I Nyoman Mahendra (2019) Pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali | Investasi Inflasi Pertumbuhan Ekonomi | Ketimpangan Distribusi Pendapatan | Investasi dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan | E-Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.8, No.11, ISSN:230 3-0178 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 9 | Siwi Nur Indryani (2016) Analisis pengaruh Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Inflasi Pertumbuhan Ekonomi | Suku Bunga | Inflasi dan suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara parsial inflasi dan suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. | Jurnal Manajemen Bisnis. Vol.4, No.2, P-ISSN: 2338-4794 |
| 10 | Windy Ayu Astuti (2017) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan | Investasi Pertumbuhan Ekonomi | Tenaga kerja Pertumbuhan Penduduk | Investasi, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan. Tenaga kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan | Jurnal akuntansi dan ekonomika. Vol.7, No. 2, E-ISSN: 2460-0585 |
| 11 | Catur Nanda Puspita Sari et al., (2019) Analisis Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap | Inflasi Investasi Pertumbuhan Ekonomi | Kesejahteraan masyarakat | Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Investasi berpengaruh | Jurnal Ekonomi Ekuilibrium Vol.3, No.1, ISSN: |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--------------------------|-------------------|--|---|
| | Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa Tahun 2006-2016 | | | positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | 2548-8945 |
| 12 | Surtika Yanti, Luluk Fadliyanti, Abdul Manan (2021) Pengaruh Belanja Modal, PMDN dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB | PMDN Pertumbuhan Ekonomi | Belanja Modal PMA | Secara parsial, belanja modal pemerintah daerah dan PMA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, sedangkan PMDN berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB | Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 7, No.1, ISSN: 1412-7601 |
| 13 | Wardhiah (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. | PAD Pertumbuhan Ekonomi | Belanja Modal | PAD berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. | Jurnal Visioner & Strategis. Vol. 7, No.1, ISSN : 2338-2864 |

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi merupakan tolak ukur pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Inflasi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perekonomian suatu negara atau wilayah tergantung pada tinggi rendahnya inflasi. Inflasi yang ringan akan berdampak positif apabila dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik ditandai dengan meningkatnya pendapatan daerah yang berimbas pada meningkatnya investasi dan tabungan oleh masyarakat. Sebaliknya inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan berdampak negatif, inflasi seperti ini akan menimbulkan peningkatan harga yang cepat, penurunan daya beli masyarakat, berkurangnya investasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi (Suseno, 2009).

Hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika inflasi relatif rendah dan stabil, dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rahmatullah (2022) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya ketika inflasi mengalami penurunan maka akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi, hal ini karena ketika terjadi inflasi maka akan memicu kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri.

2.3.2 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harrod-Domar semakin tinggi investasi maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat yang dilihat dari PDB. Dalam teori ekonomi pembanguana diketahui bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Haris Mutasim Billah, Riko Setya Wijaya (2022) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya dengan adanya kenaikan investasi maka akan terjadi kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, (Tambunan, 2006).

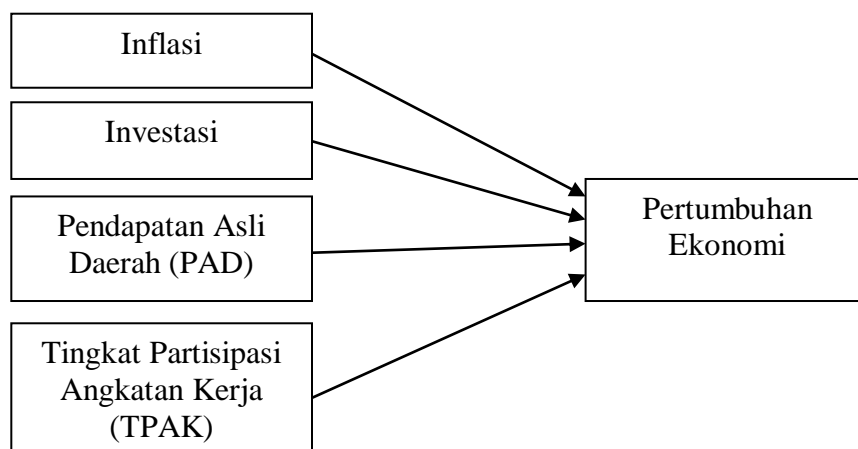
Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Peningkatan pendapatan asli daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan pendapatan asli daerah akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan Pendapatan asli daerah juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Chindy febry yori (2016) menyatakan bahwa tingkat pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.4 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah angkatan kerja dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas akan memicu kenaikan PDB yang berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Bertambahnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan total

produksi pada suatu daerah, peningkatan total produktivitas pada suatu daerah menjadikan salah satu alat ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pernyataan tersebut didasari bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan apabila jumlah dan kualitas dari tenaga kerja itu baik. Menurut sandoro sukirno (2004) dengan kualitas penduduk dan tenaga kerja yang baik maka akan menghasilkan angkatan kerja yang bermutu pula. Dengan adanya penambahan penduduk, dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan hasil produksi yang lebih banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurvani Syamsudin et al., (2021) menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan inflasi, investasi, pendapatan asli daerah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara pada penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial inflasi berpengaruh negatif sedangkan investasi, pendapatan asli daerah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022.
2. Diduga secara bersama-sama inflasi, investasi, pendapatan asli daerah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022.